



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1219>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 935-945

Research Article

Pan Islamisme Jamaluddin Al Afghani dan Sebagai Upaya Mengatasi Politik Dinasti

Fajar Pramono¹, Asrofil Fuad²

1. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; mfpramono@unida.gontor.ac.id 
2. Universitas Darussalam Gontor, Indonesia; srofilfuad93@student.afi.unida.gontor.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 02, 2024
Accepted : October 07, 2024

Revised : July 14, 2024
Available online : November 21, 2024

How to Cite: Fajar Pramono and Asrofil Fuad (2024) "Pan Islamism of Jamaluddin Al Afghani and as an Effort to Overcome Dynasty Politics", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 935-945. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1219.

Pan Islamism of Jamaluddin Al Afghani and as an Effort to Overcome Dynasty Politics

Abstract. Dynasty politics is currently being hotly discussed in the public because Dynasty Politics is considered to be destroying the democratic system that already operates within the country. Dynastic politics must be prevented immediately because it has the potential to have a negative impact on a country's government. Jamaluddin Al Afghani is an Islamic cleric who operates in the political field. With his intelligence, he has been able to create ideas that can have a big influence on Muslims, namely Pan-Islamism. This article aims to present the idea of Pan-Islamism as a means of prevention against the continuous Politics of the Dynasty. In writing this article, the author uses a qualitative descriptive method by collecting primary and secondary data. With the idea of Pan-Islamism, it is hoped that Dynasty Politics can be prevented by using five methods, including: empowering the people in the

political process, monitoring and accountability, fighting against nepotism, spreading patience and political education, and finally collaboration between movements in opposing Dynasty Politics.

Keywords: Jamaluddin Al Afghani, Pan Islamism, Dynasty Politics.

Abstrak. Politik Dinasti sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan publik pada saat ini dikarenakan Politik Dinasti dinilai merusak sistem demokrasi yang sudah berjalan dalam negara. Politik Dinasti harus segera dicegah karena berpotensi membawa dampak buruk dalam pemerintahan suatu negara. Jamaluddin Al Afghani adalah salah satu ulama Islam yang bergerak dalam bidang politik. Dengan kecerdasannya yang ia miliki sejak kecil dapat menciptakan gagasan yang dapat memberikan pengaruh besar bagi umat Islam yaitu Pan-Islamisme. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan gagasan Pan-Islamisme sebagai sarana pencegahan terhadap Politik Dinasti yang terus berkelanjutan. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Dengan adanya gagasan Pan-Islamisme, Politik Dinasti diharapkan dapat dicegah dengan menggunakan lima cara diantaranya: pemberdayaan rakyat dalam proses politik, pengawasan dan akuntabilitas, perlawanan terhadap nepotisme, penyebaran kesabaran dan pendidikan politik, dan yang terakhir adalah kolaborasi antar gerakan dalam menentang Politik Dinasti.

Kata Kunci: Jamaluddin Al Afghani, Pan Islamisme, Politik Dinasti.

PENDAHULUAN

Dalam panorama politik kontemporer, tantangan terbesar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, adalah politik dinasti. Fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan politik dan seringkali mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi serta kesejahteraan masyarakat.

Di tengah kompleksitas ini, gagasan Pan Islamisme Jamaluddin Al Afghani muncul sebagai alternatif yang menarik untuk mencegah berlanjutnya politik dinasti di Indonesia. Dengan melihat visi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh Al Afghani, dapat dipahami bahwa pandangan politiknya menawarkan landasan yang kuat untuk melawan dominasi politik keluarga yang seringkali merugikan rakyat.

Dalam konteks ini, penelusuran terhadap gagasan-gagasan Al Afghani tentang Pan Islamisme dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam konteks Indonesia menjadi hal yang penting untuk dijelajahi lebih lanjut. Dalam tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi gagasan Pan Islamisme Jamaluddin Al Afghani dan relevansinya dalam konteks Indonesia untuk mencegah berlanjutnya politik dinasti yang merugikan.

Jamaluddin Al Afghani memiliki nama lengkap Sayyid Jamaluddin Al Afghani dan ayahnya bernama Safar. Beliau adalah keturunan Sayyid Ali Attirmidzi, seorang ulama yang dihormati dalam tradisi Islam.¹ Lahir di desa Asadabad dekat Hamadan, Iran, namun, karena minimnya informasi tentang tempat kelahirannya, perbedaan pendapat muncul tentang asal usulnya. Menurut Harun Nasution, Jamaluddin Al Afghani lahir pada tahun 1839 di Afghanistan dan meninggal pada tahun 1897 di

¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.

Istanbul. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa ia lahir di Asadabad, Iran (Persia).² Jamaluddin Al Afghani dikenal sebagai ulama besar dari negeri Afghanistan, mengikuti mazhab Hanafi, dan silsilah keilmuannya dapat ditelusuri hingga kepada Sayyid Ali At-Tirmidzi, seorang ulama hadis terkemuka dalam tradisi Islam.³

Sejak kecil, Jamaluddin Al Afghani telah diajarkan tata cara membaca Al Qur'an, dan lebih dari itu, ayahnya juga mendatangkan beberapa guru dari berbagai bidang ilmu Islam untuk memberikan pendidikan kepadanya.⁴ Dengan kecerdasan luar biasa, Jamaluddin Al Afghani mampu menguasai hampir seluruh ilmu keislaman dan filsafat sebelum mencapai usia 18 tahun. Keingintahuannya yang besar dan semangat belajarnya yang tak kenal lelah memungkinkannya untuk menyerap pengetahuan dengan cepat dan mendalam, menciptakan fondasi yang kokoh untuk perjalanan intelektualnya yang akan datang.⁵

Ketika usianya mencapai 22 tahun, Jamaluddin Al Afghani memulai pengabdian untuk pertama kalinya di Afghanistan pada tahun 1864, namun karena alasan keamanan, beliau kemudian memutuskan untuk pindah ke India pada tahun 1869.⁶ Setahun kemudian, dia berpindah ke Turki, dan setelah beberapa waktu di sana, dia melanjutkan perjalanannya ke Iran di mana dia bahkan menjabat sebagai Menteri Penerangan. Perjalanan hidupnya yang berkelana membawanya ke berbagai belahan dunia Muslim, memungkinkannya untuk memperluas wawasannya tentang politik, agama, dan budaya yang beragam dalam dunia Islam.⁷

Pada tahun 1879, terbentuklah Partai Nasional, atau yang biasa disebut Al Hisb Al Wathani⁸, yang mencerminkan kepeduliannya terhadap politik kenegaraan dan menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Kemudian, beberapa bulan setelahnya, di Paris, ⁹beliau mendirikan suatu perkumpulan yang dinamakan Urwat Al Wustqa, sebuah forum atau kelompok yang beranggotakan orang-orang Islam dari berbagai negara. Dalam forum ini, diskusi-diskusi penting mengenai keadaan umat Islam dan strategi-strategi politik dilakukan, memungkinkan ide-ide dan pemikiran yang inovatif untuk dipertukarkan dan diseminasi di antara para aktivis politik dan intelektual Muslim.¹⁰

Dan pada tahun 1892, beliau berpindah ke Istanbul dengan harapan untuk bekerja sama dengan Sultan Abdul Hamid, namun upaya tersebut tidak tercapai

² Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 56.

³ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176-205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

⁴ M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern dalam Islam: Mengenal Pokok-Pokok Pemikiran Para Pemukanya* (Surabaya: al-Ikhlās, 1982), 42.

⁵ Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslims*, (USA: Library Of Islam, 1923), 264.

⁶ M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern dalam Islam...*, 41.

⁷ M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern dalam Islam...*, 42.

⁸ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, 52.

⁹ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfīyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfīyah.v6i1.6837>.

¹⁰ Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran: Perkembangan Modern dalam Islam*, Ed. I; (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 43.

karena sistem kekuasaan otokrasi yang dipertahankan oleh Sultan Abdul Hamid. Pada akhirnya, Jamaluddin Al Afghani wafat pada tahun 1897, meninggalkan warisan intelektual dan politik yang besar yang terus memengaruhi pemikiran dan gerakan Islam hingga saat ini. Kepergiannya meninggalkan kesan yang mendalam dalam sejarah politik dan intelektual Islam, dan karya serta pandangannya tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam memperjuangkan perubahan dan kemajuan di dunia Muslim.¹¹

PEMBAHASAN

Gerakan Pan-Islamisme Jamaluddin Al Afghani

Jamaluddin Al-Afghani memiliki pandangan tentang ide-ide politik yang selalu konsisten, meskipun kepada fokus yang berubah-ubah. Sebagai tokoh penting dalam pembaruan Islam, ¹²Jamaluddin Al Afghani banyak menyumbangkan ide-ide pemikirannya terutama dalam bidang politik. Dua komponen utama pemikiran politik Al Afghani adalah kesatuan dunia Islam dan popularisme. Salah satu gagasan Al Afghani yang sangat berpengaruh adalah Pan Islamisme sebagai doktrin kesatuan politik dunia Islam, untuk melindungi negara Muslim dari kolonialisme asing.

Gagasan Pan Islamisme Al Afghani tidak muncul begitu saja, tetapi hadir untuk menjawab persoalan zaman. Semuanya bermula ketika ia melihat miskinnya negara Mesir yang disebabkan karena banyaknya bangsa Barat yang mengeksploitasi bangsa mereka. Eksploitasi bangsa barat ternyata bukan hanya dirasakan oleh Jamaluddin Al Afghani, melainkan dirasakan oleh beberapa tokoh Islam di beberapa daerah timur tengah. Hal inilah yang menjadi dasar keinginan Al Afghani dalam menyatukan umat Islam.¹³

Para sejarawan sering berargumentasi bahwa Pan Islamisme sebagai ideologi agama-politik, adalah sebuah fenomena baru dan baru muncul pada paruh kedua abad ke sembilanbelas.¹⁴ Sehingga banyak sejarawan memaknai kata Pan Islamisme bervariasi. Dari banyak nya sejarawan yang mendefinisikan Pan Islamisme, kata-kata Jamaluddin Al Afghani merupakan indikasi terbaik dalam memahami Pan Islamisme¹⁵, mengingat peran dan pemikiran revolusioner yang dia usung, yang menempatkannya sebagai salah satu tokoh sentral dalam gerakan ini serta sebagai arsitek visi persatuan umat Islam di seluruh dunia.

Pan Islamisme merupakan salah satu gagasan paling populer Jamaluddin Al-Afghani. Berkat gagasan ini, Al Afghani dianggap sebagai pembimbing terbaik untuk organisasi politik Islam global yang menjadikan Pan Islamisme sebagai titik fokus

¹¹ Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran...*, 43.

¹² Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25-62, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.

¹³ Nur Hadi Ihsan, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma, "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme," *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.

¹⁴ Azmi ozcan, *PAN-ISLAMISM*, (New York: Brill, 1997), 23.

¹⁵ Jacob M. Landau, *The Politics Of Pan-Islam*, (New York: Oxford University Press, 1990), 15.

proyek politiknya.¹⁶ Dan memandangnya sebagai tonggak utama dalam mencapai persatuan umat Islam di seluruh dunia.¹⁷

Al Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam (Jami'ah islamiyah) atau Pan-Islamisme dalam upaya pemurnian akidah dan ajaran Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam. Al Afghani berpendapat bahwa persekutuan politik wajib mencakup semua orang Islam dari seluruh dunia, baik yang tinggal di negara merdeka, maupun yang belum merdeka. Persekutuan itu bertujuan untuk membangun persatuan umat Islam dalam perjuangan pertama. Persatuan tersebut guna mengubah bentuk pemerintahan berlaku sewenang-wenang dan mengubahnya menjadi pemerintahan sesuai dengan apa yang diajarkan Islam sehingga mampu memberikan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi umat Islam serta seluruh masyarakat.¹⁸

Pan Islamisme selain sebagai sarana untuk memujudkan persatuan umat Islam¹⁹, juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas di antara umat Islam agar kemajuan budaya, agama, dan materiilnya dapat tercapai secara bersama-sama.²⁰ Perlu dicatat bahwa dalam konsep Pan-Islamisme yang diperjuangkan oleh Al Afghani, tidaklah bermakna penggabungan kerajaan-kerajaan menjadi satu entitas politik tunggal. Sebaliknya, fokus utamanya adalah pada penyatuan cara pandang terhadap pemerintahan dengan mengacu kembali kepada Al Qur'an dan Sunnah.²¹ Konsep serupa juga ditekankan oleh Hamka, yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme bukanlah tentang peleburan kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, melainkan pada penyatuan pandangan hidup yang berpusat pada Islam.²² Semua ini bertujuan untuk mengembalikan kepentingan umat Islam sebagai poros utama dalam pemerintahan. Al Afghani meyakini bahwa kemajuan sebuah pemerintahan bukanlah karena mengadopsi konsep sekuler Barat, tetapi sejatinya terletak pada pemerintahan yang berlandaskan ajaran agama. Misi Al Afghani adalah untuk mengembalikan pemerintahan yang telah terpengaruh oleh konsep-konsep Barat, agar kembali memperkuat fondasi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.²³

Tujuan dari pengembalian politik Islam karena politik sangat penting karena mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Kestabilan politik sebuah negara sangat memengaruhi kehidupan manusia di dalamnya. Banyak aspek kehidupan, termasuk budaya, ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya, sangat

¹⁶ Seyyed Hossein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern: Bimbingan Untuk Kaum Muda Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), 3-5.

¹⁷ Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).

¹⁸ Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

¹⁹ Azmi ozcan, *PAN-ISLAMISM*, ..., 46.

²⁰ Azmi ozcan, *PAN-ISLAMISM*, ..., 47.

²¹ Yusron Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 77.

²² Hamka, *Said Jamaluddin Al-Afghani*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 44.

²³ Mohammad Latief dkk., "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14, <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

dipengaruhi oleh politik.²⁴ Sehingga pemerintahan yang baik membutuhkan politik yang baik, dan politik yang baik membutuhkan tuntunan dari agama yang baik.

Albert Hourani menyatakan bahwa seruan dan kesatuan yang merupakan tujuan utama dari Jamaluddin Al Afghani, menyoroti pentingnya memastikan bahwa politik dinasti tidak menjadi penghalang bagi pencapaian persatuan dan kesatuan umat Muslim. Dia menegaskan bahwa para pemimpin Muslim seharusnya bekerja sama demi kepentingan Islam.²⁵ Namun, ironisnya, masih terdapat beberapa negara yang masih mengadopsi sistem politik dinasti, yang dapat menghambat kemajuan menuju persatuan dan kesatuan yang diinginkan. Pandangan Al Afghani terhadap Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam akan terwujud melalui kesuksesan dalam membangun persatuan dan kesatuan di antara mereka, dan ini merupakan landasan utama dalam mewujudkan tujuan Pan-Islamisme.²⁶

Upaya Pan Islamisme Mengatasi Politik Dinasti

Politik Dinasti adalah tema yang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik hari-hari ini, terutama karena dapat menjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip Pan-Islamisme.²⁷ Yang menjadi pelaku utama dalam politik dinasti berasal dari para kalangan politisi yang seringkali dianggap mewakili kepentingan pribadi atau keluarga daripada kepentingan umum. Seorang ilmuwan bernama Charles Taylor menjelaskan bahwa politik adalah sebuah usaha untuk mengubah dunia menjadi lebih indah dengan didasarkan keadilan.²⁸ Pandangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pan-Islamisme yang mendorong pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.²⁹

Secara sejarah, politik dinasti ditarik lurus kepada dinasti Umayyah, yang merupakan salah satu dari empat dinasti besar dalam sejarah Islam. Runtuhnya dinasti Umayyah disebabkan oleh banyaknya permasalahan politik yang ada pada saat itu, di antaranya: Khalifah atau pemimpin memiliki kekuasaan yang absolut yang tidak mengenal kompromi, gaya hidup khalifah yang suka berfoya-foya, tidak adanya sebuah kebijakan yang dihasilkan secara tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah atau pemimpin, serta ketidakpuasan umat terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di bawah pemerintahan dinasti tersebut.³⁰

²⁴ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 100.

²⁵ Albert Hourani, *Pemikiran Liberal Di Dunia Arab*, (Bandung: Mizan, 2004), 187.

²⁶ Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma, "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري، وابن تيمية،" *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153-88, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.

²⁷ Mohammad Muslih dkk., "STATUM AGAMA DALAM SEJARAH SAINS ISLAM DAN SAINS MODERN" 6 (2021): 17, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v6i2.1845>.

²⁸ Dr. Zaprukhan, M.si, *Filsafat Umum Sebuah Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Rajawali persada, 2016), 247.

²⁹ Mohammad Muslih, Heru Wahyudi, dan Amir Reza Kusuma, "Integrasi Ilmu dan Agama menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ian G Barbour," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13, no. 1 (2022): 21-35, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/>.

³⁰ Ely Zainudin, "Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah", *Jurnal Itelegensia*, Vol.3 No. 3, (Desember, 2015), 33.

Dalam konteks Pan Islamisme, keruntuhan dinasti Umayyah dapat dianggap sebagai peringatan akan bahaya politik dinasti yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi gerakan Pan Islamisme yang menuntut pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara bahasa dinasti politik dimaknai dengan melakukan strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki dengan cara mewariskan kekuasaan tersebut kepada kalangan keluarga³¹ Sistem pemerintahan dinasti merupakan pemerintahan yang sistemnya dipimpin oleh seorang raja yang diangkat dari keluarga dan berjabatan seumur hidup, kemudian akan digantikan oleh anggota keluarganya sebagai penerusnya.³² Model ini, yang dikenal dengan politik dinasti, menciptakan ketidakpastian dalam stabilitas politik karena kepemimpinan tidak ditentukan berdasarkan kualifikasi atau aspirasi rakyat, melainkan oleh garis keturunan. Untuk mengatasi dominasi politik dinasti, pemberdayaan rakyat menjadi kunci utama. Dengan memberdayakan rakyat melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan kapasitas, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses politik dan memperjuangkan kepentingan mereka secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada kelompok-kelompok politik yang terlibat dalam politik dinasti. Melalui partisipasi yang kuat dan sadar akan hak-hak mereka, rakyat dapat menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin politik.

Politik dinasti menjadi sebuah fenomena yang semakin meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia, dan menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan bersama. ³³Lahirnya dinasti politik di dalam pemerintahan Indonesia disebabkan oleh tiga hal: lemahnya partai politik dalam menyiapkan kader yang berkualitas sehingga mudah dikalahkan oleh partai-partai elit, dikuatkannya neo-feodalisme di berbagai daerah yang dimanfaatkan oleh elit politik sehingga dapat memperkuat kekuasaannya, Biaya politik yang mahal.³⁴

Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, sebuah sistem yang menurut Abraham Lincoln diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³⁵ Hakikat demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan negara saja, namun lebih pada proses pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat.³⁶ Dalam konteks demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilakukan melalui proses pemilihan yang adil dan transparan, sehingga memberikan

³¹ Fery Dona, "Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7 no.2, (2022), 126.

³² Chotib dkk, *Kewarganegaraan 3, Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT,Ghalia Indonesia, 2007), 20.

³³ Amir Reza Kusuma, "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas," *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/DOI : 10.15548/alqalb.v13i2.4386>.

³⁴ Fery Dona, "Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah...", 135.

³⁵ Jalil Abdul, "Kompatibilitas Islam dan Demokrasi", *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol.8 No.1 (Juni, 2020), 433.

³⁶ Retno Mawarini Sukmariningsih dan Ceprudin, "Batasan Politik Dinasti Prespektif Moral Hukum", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 21 No.2, (Oktober, 2023), 11.

kesempatan bagi rakyat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi instrumen penting dalam mengatasi politik dinasti. Dengan memperkuat mekanisme pengawasan independen dan transparan, serta mendorong penerapan prinsip akuntabilitas bagi para pemimpin politik, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan politik tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau keluarga, tetapi benar-benar melayani kepentingan publik secara adil dan merata. Dengan demikian, pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang kuat akan membantu menjaga integritas sistem demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam politik dinasti.

Tanda-tanda politik dinasti mencakup penunjukan anggota keluarga, seperti anak, istri, paman, dan saudara lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam berbagai lembaga negara maupun partai politik.³⁷ Fenomena ini menandakan adanya pengaruh politik yang kuat dari keluarga atau kerabat tertentu dalam pengambilan keputusan politik, yang dapat menghambat proses demokratisasi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan. Perlawanan terhadap nepotisme menjadi penting dalam mencegah politik dinasti. Dengan menolak praktik nepotisme yang sering terjadi dalam politik dinasti, masyarakat dapat memastikan bahwa penunjukan pejabat didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi, bukan hubungan keluarga atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, perlawanan terhadap nepotisme akan menghasilkan sistem politik yang lebih transparan, adil, dan inklusif, yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai elemen masyarakat dalam proses politik.³⁸

Kekuasaan politik yang seringkali terkonsentrasi dalam satu keluarga dapat memiliki dampak serius terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan sumber daya publik untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.³⁹ Praktik semacam ini mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan merusak integritas sistem pemerintahan, dengan mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat atas kepentingan umum. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan kekuasaan ini bisa mencakup nepotisme dalam penunjukan pejabat, korupsi dalam penggunaan dana publik, atau manipulasi dalam proses politik untuk mempertahankan dominasi keluarga tersebut. Untuk mencegah politik dinasti, perlu dilakukan penyebaran kesadaran dan pendidikan politik yang luas di masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya demokrasi, prinsip-prinsip akuntabilitas, dan perlawanan terhadap nepotisme, masyarakat dapat lebih waspada terhadap praktik politik dinasti dan lebih aktif dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Pendidikan politik yang inklusif dan menyeluruh juga akan mempersiapkan masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dengan cara yang

³⁷ Rizki Stafiril, "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam", *Journal of Education on Social Science*, Vol.4 No.1, (April, 2020), 127.

³⁸ Nur Hadi Ihsan dkk., "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31, <https://doi.org/DOI: 10.28944/reflektika.v17i1.445>.

³⁹ Aan Supian, *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadist*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 114.

konstruktif dan efektif, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok politik tertentu.

Sebagai tambahan, cara terakhir untuk mencegah politik dinasti adalah kolaborasi antar gerakan-gerakan politik yang memiliki tujuan serupa dalam menentang politik dinasti.

KESIMPULAN

Jamaluddin Al Afghani merupakan salah satu ulama Islam yang bergerak dalam bidang politik. Salah satu gagasan Jamaluddin Al Afghani yang sangat berpengaruh adalah Pan Islamisme sebagai doktrin kesatuan politik dunia Islam, untuk melindungi negara Muslim dari kolonialisme asing.

Tujuan dibuatnya gagasan Pan Islamisme adalah sebagai sarana untuk memujudkan persatuan umat Islam, dan juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas di antara umat Islam agar kemajuan budaya, agama, dan materiilnya dapat tercapai secara bersama-sama.

Di negara-negara saat ini khususnya di Indonesia, politik dinasti sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan publik. Karena politik dinasti dinilai merusak sistem demokrasi yang sudah berjalan karena akan membawa dampak buruk dalam pemerintahan pada suatu negara.

Hadirnya gagasan Pan Islamisme Jamaluddin Al Afghani sebagai solusi pencegahan berlanjutnya sistem politik dinasti. Dalam mencegah berlanjutnya sistem politik dinasti Pan Islamisme memiliki empat cara yang diharapkan dapat mencegahnya, diantaranya: Pemberdayaan Rakyat, Pengawasan dan Akuntabilitas, Perlawanan Terhadap Nepotisme, Penyebaran Kesabaran dan Pendidikan Politik, dan yang terakhir adalah Kolaborasi Antar Gerakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Jalil. (2020). Kompatibilitas Islam dan Demokrasi. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*. 8(1).
- Ahmad, Jamil. 1923. *Hundred Great Muslims*. USA: Library Of Islam.
- Asmuni, M. Yusran. 1982. *Aliran Modern dalam Islam: Mengenal Pokok-Pokok Pemikiran Para Pemukanya*. Surabaya: al-Ikhlâs.
- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.

- Ihsan, Nur Hadi, Fachri Khoerudin, dan Amir Reza Kusuma. "Konsep Insan Kamil Al-Jilli Dan Tiga Elemen Sekularisme." *Journal for Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 18. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.323>.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, dan Alif Rahmadi. "WORLDVIEW SEBAGAI LANDASAN SAINS DAN FILSAFAT: PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM," t.t., 31. <https://doi.org/DOI:10.28944/reflektika.v17i1.445>.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Konsep Psikologi Syed Muhammad Naquib al-Attas." *Jurnal Al-Qalb* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:10.15548/alqalb.v13i2.4386>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Mohammad Muslih, Heru Wahyudi, dan Amir Reza Kusuma. "Integrasi Ilmu dan Agama menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ian G Barbour." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13, no. 1 (2022): 21–35. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/>.
- Muhammad Syifa'urrahman dan Amir Reza Kusuma. "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 1 (10 Agustus 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Muslih, Mohammad, Amir Reza Kusuma, Sofian Hadi, Abdul Rohman, dan Adrian Syahidu. "STATUM AGAMA DALAM SEJARAH SAINS ISLAM DAN SAINS MODERN" 6 (2021): 17. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v6i2.1845>.
- Asmuni, Yusron. 1998. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chotib dkk. 2007. *Kewarganegaraan 3: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: PT, Ghalia Indonesia.
- Dona, Fery. (2022). Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(2).
- Dr. Zaprukhan, M.si. 2016. *Filsafat Umum Sebuah Pendekatan Tematik*. Jakarta: Rajawali persada.
- Hamka. 1981. *Said Jamaluddin Al-Afghani*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hourani, Albert. 2004. *Pemikiran Liberal Di Dunia Arab*. Bandung: Mizan.
- Landau, Jacob M. 1990. *The Politics Of Pan-Islam*. New York: Oxford University Press.
- Madjid, Nurcholish. 1994. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1994. *Menjelajah Dunia Modern: Bimbingan Untuk Kaum Muda Muslim*. Bandung: Mizan.

- Nasution, Harun. 1992. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ozcan, Azmi. 1997. *PAN-ISLAMISM*. New York: Brill.
- Sani, Abdul. 1998. *Lintasan Sejarah Pemikiran: Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Stafril, Rizki. (2020). Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam. *Journal of Education on Social Science*. 4(1).
- Sukmariningsih, Retno Mawarini & Ceprudin. (2023). Batasan Politik Dinasti Prespektif Moral Hukum. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 21(2).
- Supian, Aan. 2019. *Etika Politik Dan Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Hadist*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zainudin, Ely. (2015). Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Jurnal Itelegensia*, 3(3).